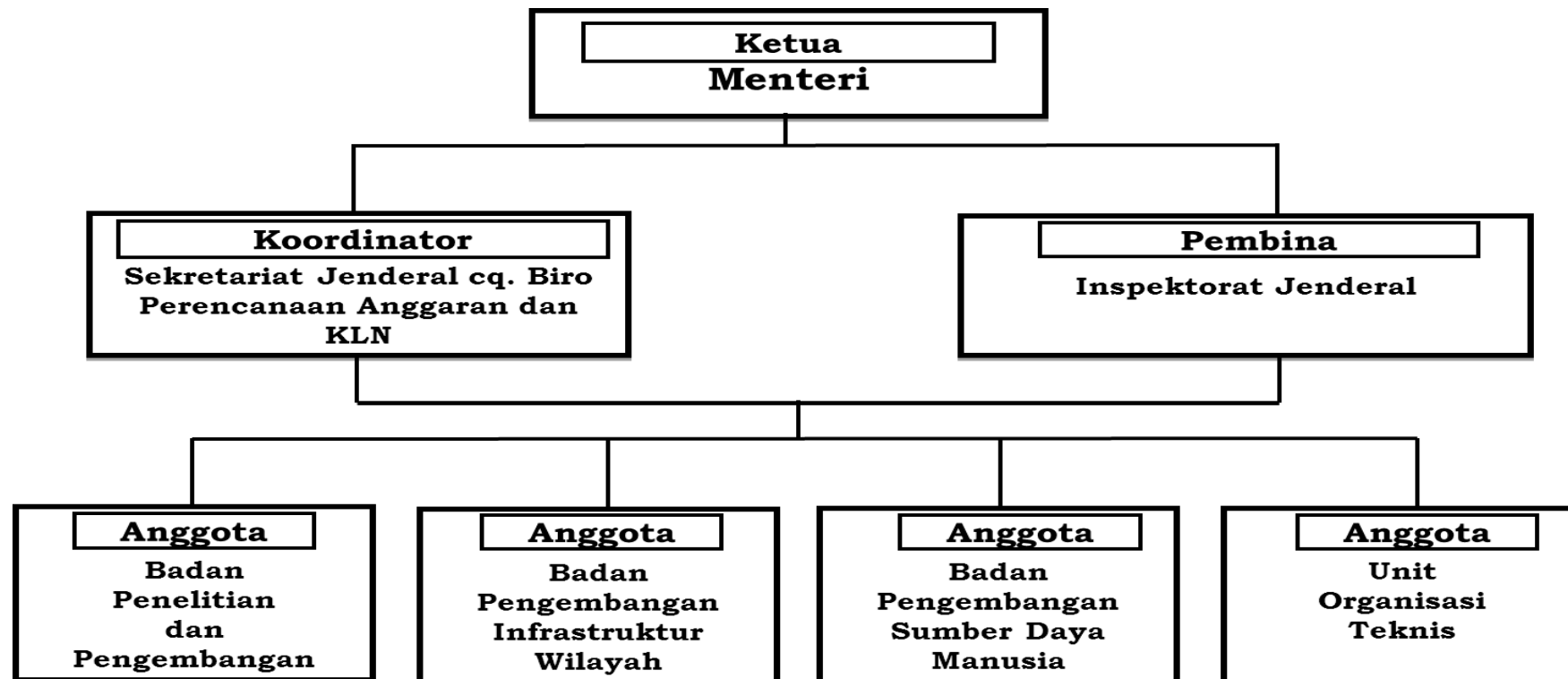


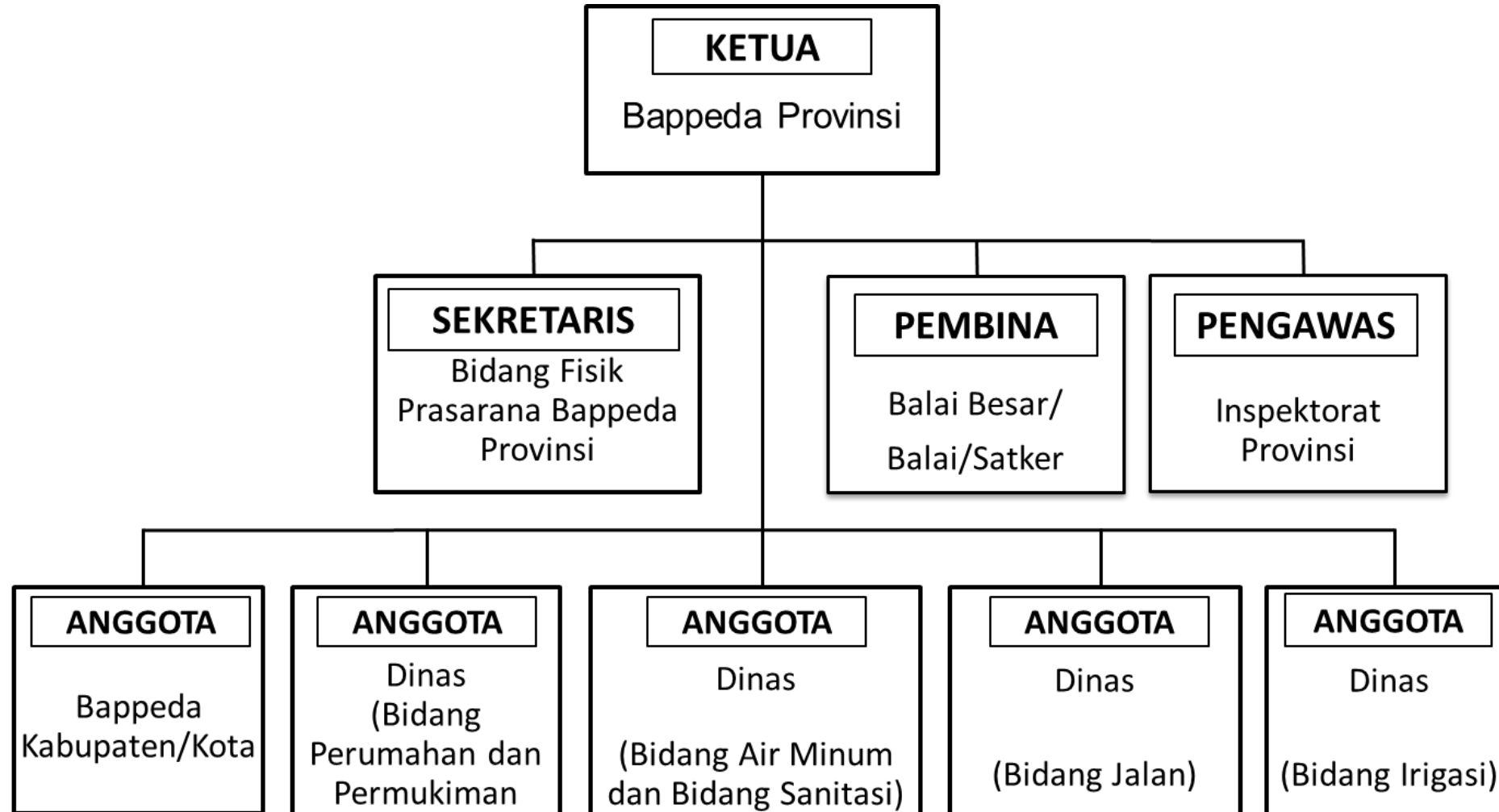
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 21/PRT/M/2017
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT

1.

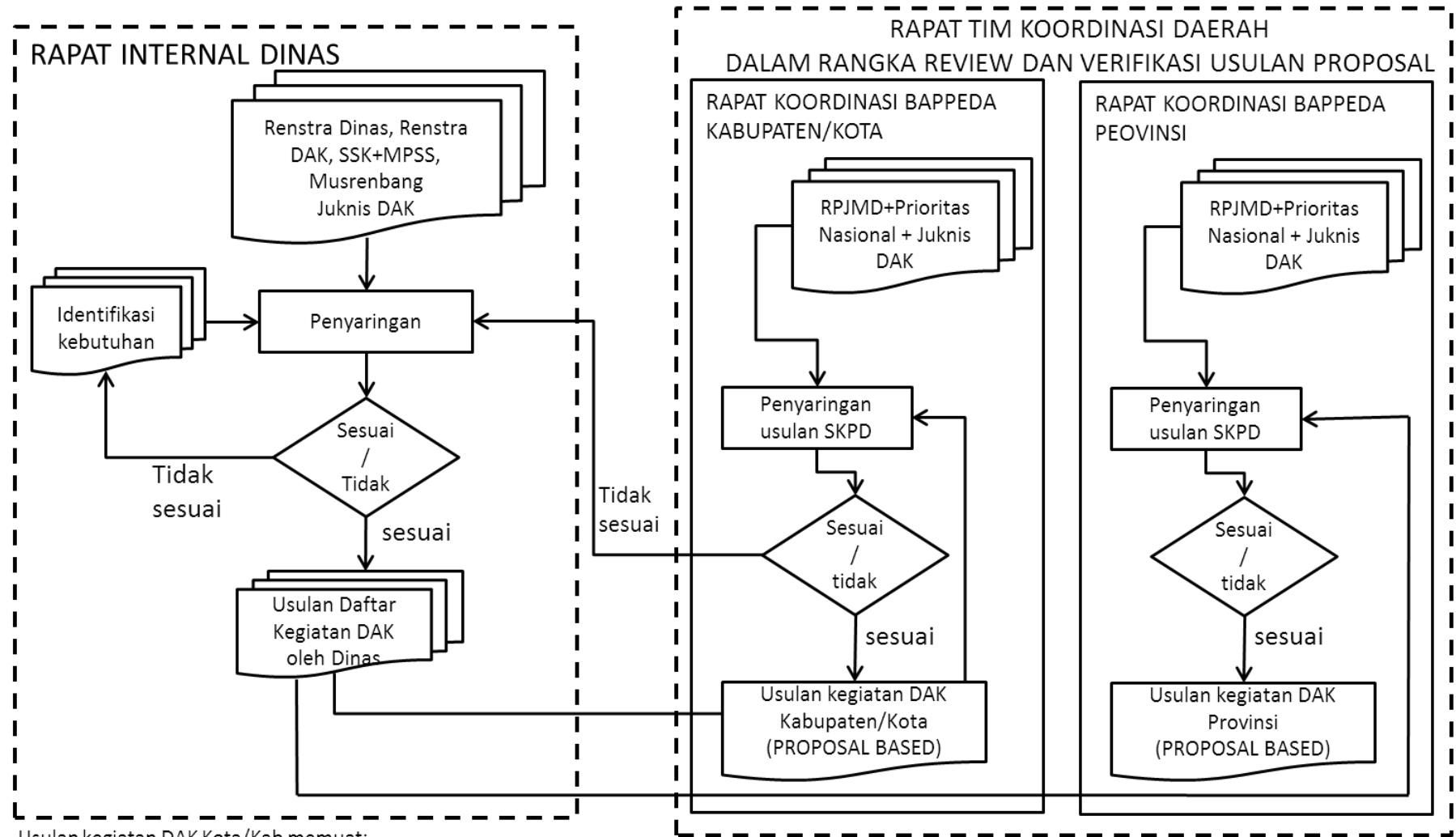


STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH



TAHAP PERENCANAAN :

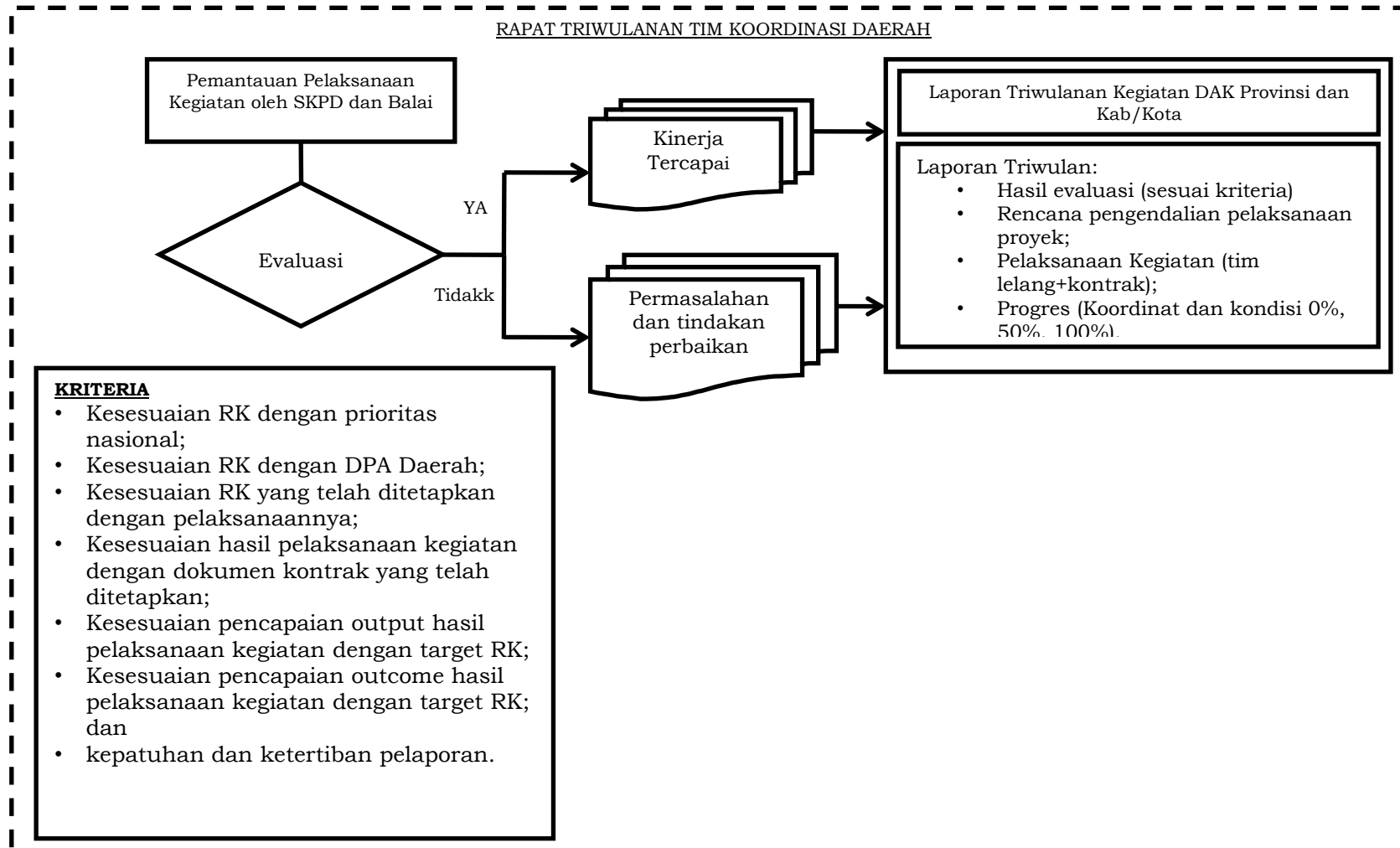
PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



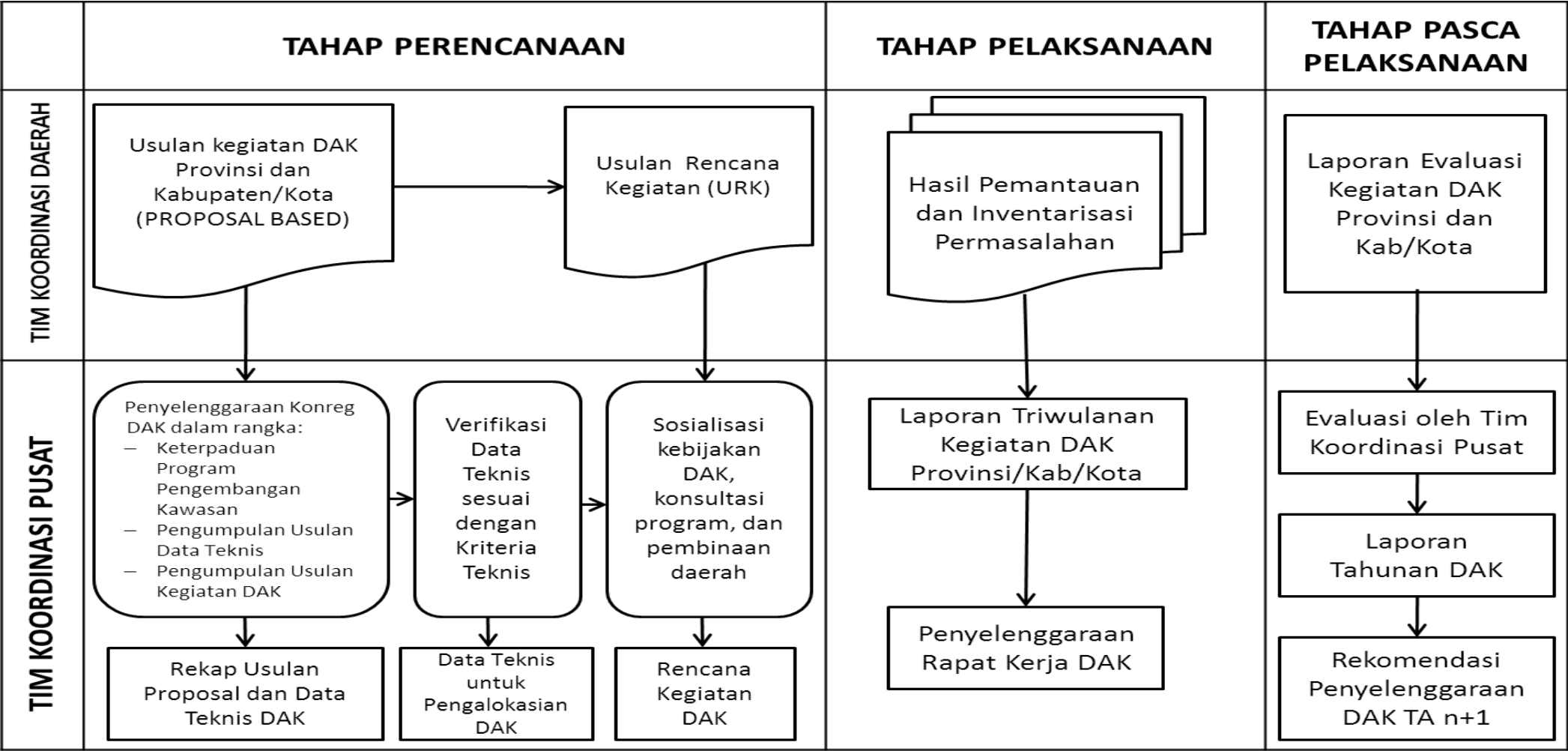
Usulan kegiatan DAK Kota/Kab memuat:

- Latar belakang usulan dan usulan prioritas utama.
- Data Teknis
- Rekap lokasi dan RAB
- Kontribusi thd target daerah (RPJMD, Prioritas Nasional,)

TAHAP PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN:
PROSES PEMANTAUAN TRIWULANAN DAN EVALUASI
TIM KOORDINASI DAERAH



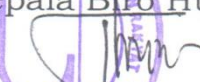
ALUR KOORDINASI ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN TIM KOORDINASI DAERAH



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001